

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI DESA SONSILO KECAMATAN LIKUPANG BARAT

Ricardo Tahulending¹
Markus Kaunang²
Ismail Sumampow³

Abstrak

Musrenbang adalah forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrempang) di desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah desa tidak serta-merta memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk berkarya bagi desanya melainkan warga masyarakat hanya menjadi penonton terhadap pemerintah lewat wacana program-program yang ada, peneliti menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tergantung pelayanan dan kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat yang ada di desa Sonsilo. Kekecewaan masyarakat terhadap mekanisme kegiatan yang tanpa transparan terhadap desa sedangkan masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan musrempang yang dilakukan di setiap tahunnya. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrempang yang diadakan di desa Sonsilo tetapi hasil dari musrempang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama. Hasil musrempang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Musrempang.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, dimana partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen proses pembangunan desa, karena itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu. Partisipasi masyarakat yang merupakan tolak ukur dalam menilai apakah merupakan proyek pembangunan masyarakat atau bukan.

Sehubungan dengan uraian tentang keharusan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan hubungan penulisan skripsi ini, Penulis mencoba mengangkat permasalahan yang terjadi di Desa Sonsilo, Kecamatan Likupang Barat, Provinsi Sulawesi Utara, terkait dengan kurangnya pelibatan masyarakat dalam hal pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di Desa. Karena, minimnya pelibatan terhadap masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan terkesan merupakan pembodohan terhadap masyarakat, dan tendensi terhadap penyalahgunaan wewenang begitu besar. Apakah ini merupakan konsep atau strategi dari seorang Kepala Desa untuk bisa mencapai kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Di dalam hal musyawarah di Desa, masyarakat tidak pernah diundang untuk hadir dalam musyawarah. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat atau tanpa pelibatan dalam hal pengambilan keputusan justru menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, kenapa, dan apa alasannya. Transparansi sangatlah dibutuhkan masyarakat guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama, untuk mensejahterakan masyarakat Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat.

Tinjauan Pustaka

Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemeliharaan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan ketelibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Sumaryadi (2005:46) partisipasi berarti “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”. Dengan maksud dan tujuan yang agar masyarakat dapat menjaga hasil dari pembangunan karena merasa bahwa pembangunan itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut.

Menurut Koho (2007:126) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yakni:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Menurut Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”. Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif

dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Soetomo (2012:116) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu peran di mana terdapat adanya pembangunan untuk menuju kepada peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut. Karenanya, partisipasi masyarakat dalam lingkungan pedesaan merupakan manifestasi terhadap peran masyarakat dalam mendukung suatu perubahan sosial melalui hubungan timbal balik antara masyarakat dan desa. Artinya bahwa adanya ketergantungan antara masyarakat dengan desa dalam upaya peningkatan atau kemajuan baik masyarakatnya maupun desanya secara universal. Untuk itu, hubungan ini terus berlanjut ketika pembangunan itu selalu dilaksanakan dalam lingkungan desa.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Soetomo 2008:12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu :

a. Partisipasi dalam perencanaan (Participation in Decision Making)

Partisipasi dalam perencanaan adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in Implementation)

Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang diparticipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (Participation in Benefit)

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan.

d. Partisipasi dalam evaluasi (Participation in Evaluation)

Partisipasi dalam evaluasi adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan secara langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam berbagai hal untuk kemajuan bersama dalam bermasyarakat. Oleh karena itu kita harus mengenal lebih dekat bentuk dan tipe partisipasi yang ada disekitar masyarakat. Menurut Hamijoyo (2017:21, & Pasaribu dan Simanjuntak (2005:11) ada beberapa bentuk partisipasi yakni sebagai berikut:

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- 3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
- 4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- 5) Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan

pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

- 6) Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun untuk itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien

Muhi (2013:1). Pembangunan desa tidak hanya terlepas pada pembangunan fisik saja, akan tetapi mencakup ruang lingkup yang sangat luas Artinya bahwa pembangunan desa itu harus mencakup segala aspek kehidupan masyarakat desa baik itu kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, maupun sumber daya manusianya. Sehingga tujuan daripada pembangunan

desa itu dapat tercapai. Rahardjo (2010:97) berbicara tentang pembangunan desa, kita harus melihat ciri-ciri fisik daripada desa itu sendiri, artinya bahwa struktur fisik suatu desa itu berbeda dengan desa yang lainnya, sehingga pembangunan desa harus disesuaikan dengan letak geografis suatu desa. Di mana kita harus melihat iklim, curah hujan, keadaan atau jenis tanah, ketinggian tanah, tingkat kelembaban udara, serta topografi desa tersebut. Menurut Soekanto (2005:437) mengemukakan bahwa pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Rahardjo (2010:480). Istilah desa juga sebelumnya hanya dikenal di daerah Jawa dan Bali, yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air atau tanah kelahiran, kemudian istilah desa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Saparin (dalam Raharjo 2010:58-59) bahwa ada beberapa jenis desa yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Desa tambangan (kegiatan penyeberangan orang dan barang di mana terdapat sungai besar; desa nelayan; desa pelabuhan,
- 2) Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak, karena diwajibkan menjaga suatu makam bagi raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja),
- 3) Desa penghasil usaha pertanian; kegiatan perdagangan; industri; pertambangan; dan sebagainya,

4) Desa perintis (desa yang terbentuk karena adanya kegiatan transmigrasi) dan,

5) Desa pariwisata. Dari beberapa jenis desa tersebut, desa nelayan merupakan desa yang sangat penting dan sangat banyak di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sebagian besar daratan Indonesia di kelilingi oleh lautan.

Roucek dan Warren (dalam Rahardjo 2010:40) memberikan ciri-ciri masyarakat desa sebagai berikut:

- 1) Besarnya peranan kelompok primer;
- 2) Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi;
- 3) Hubungan lebih bersifat intim dan awet;
- 4) Bersifat homogen;
- 5) Obilitas sosial rendah;
- 6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi;
- 7) Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar Kemudian permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat desa selalu tidak terlepas dari masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan sebagainya, yang kemudian berdampak pada pembangunan desa itu sendiri. Hal ini yang sering menghambat pertumbuhan desa menjadi desa yang mandiri. Pembangunan desa dapat membantu perkembangan desa itu sendiri, sehingga desa mampu menjadi desa yang mandiri.

Belgel (dalam Basundoro, 2012:20) mengemukakan pada umumnya desa disebut sebagai village, yaitu setiap tempat pemukiman petani yang terlepas dari besar dan kecilnya daerah tersebut. Oleh sebab itu desa biasa disebut sebagai daerah pertanian atau daerah agraris. Secara universal, desa

merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural).

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, penggunaan istilah desa dapat menggunakan istilah lain sesuai dengan nama lain sesuai karakteristik adat istiadat setempat, begitu juga dengan segala istilah dan institusi di desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Contohnya adalah istilah desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Menurut data yang dikutip dari BPS (2013), di Indonesia terdapat ribuan desa yang letaknya menyebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, lebih tepatnya 80.714 desa yang berada menyebar di seluruh Indonesia.

Secara Umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif sama, yaitu: desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam; iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga desa banyak tergantung pada perubahan musim; keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja; Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar; kegiatan ekonomi mayoritas agraris; masyarakat desa merupakan suatu paguyuban; proses sosial di desa umumnya berjalan lambat; warga desa pada umumnya berpendidikan rendah. Desa mempunyai tiga unsur penting, yaitu: daerah, meliputi lokasi, luas, dan batas wilayah serta penggunaannya penduduk. berkaitan erat dengan kualitas dan kuantitas penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian; tata kehidupan. dalam hal

ini pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan sesama warga desa, biasanya hubungan antaranggota masyarakat masih sangat erat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena hanya ada satu variabel dan data yang terkumpul analisisnya bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono, 2008 : 28). Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat.

Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah tidak terlalu mementingkan jumlah sumber data atau informan, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber/informan yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh karena itu teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah "purposive sampling" yaitu penentuan sumber data berdasarkan tujuan tertentu (Sugiono, 2009 : 43). Yang menjadi informan maupun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa/ Hukum Tua
2. Kepala Urusan Pemerintahan
3. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pembangunan
4. Kepala Jaga I-III

5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
6. Tokoh Masyarakat

Hasil Penelitian

Partisipasi masyarakat sangat menentukan tumbuh kembangnya suatu desa, daerah bahkan suatu negara sekalipun. Oleh karena itu, peneliti mencoba men-jelaskan hasil penelitian ini dalam pembahasan selanjutnya. Peneliti menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff (dalam Soetomo (2008:12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu; partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam perencanaan adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini beru-pa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijakan yang se-dang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana pri-oritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyara-kat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

Dari hasil pemaparan diatas peneliti menemukan bahwa pemerintah desa tidak serta-merta memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk berkarya bagi desanya melainkan warga masyarakat hanya menjadi penonton terhadap pemerintah lewat wacana program-program yang ada. Seharusnya dengan adanya musrembang warga

masyarakat bisa belajar banyak hal dan bisa berdikari serta memberikan ide-ide untuk pembangunan desanya. Oleh karena pemerintah tidak begitu memberi ruang kepada masyarakat untuk berkarya kepada desanya mengakibatkan partisipasi masyarakat menurun dalam hal apapun yang pemerintah desa sediakan. Karena masyarakat menganggap semua program yang ada bukan dari mereka tetapi dari pemerintah untuk kepentingan orang-orang pemangku jabatan dalam desa dan untuk kepentingan pemerintah desa sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan di desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat sangat memprihatinkan alias turunya partisipasi masyarakat terhadap semua kegiatan yang ada dala desa Sonsilo, mengakibatkan pertumbuhan dan pembangunan desa Sonsilo tidak sesuai harapan pemerintah desa. Dari hasil penelitian ini sebaiknya pemerintah berbenah diri dari sekarang untuk menciptka suasana yang aman, tentram serta sejahtera. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.

Seperti pada penjelasan teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Soetomo (2008:12) diatas maka peneliti menemukannya dari hasil wa-

wawancara dilapangan bahwa masyarakat akan berpartisipasi jika semua program pembangunan itu benar-benar dari pemerintah untuk rakyat. Tetapi jika program itu untuk kepentingan orang-orang tertentu dalam desa maka pemerintah desa jangan berharap lebih dari masyarakat serta meminta bantuan masyarakat berpartisipasi dalam berbudaya untuk pembangunan desa.

Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tergantung pelayanan dan kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat yang ada di desa Sonsilo. Kurangnya partisipasi dalam setiap kegiatan musyawarah rencana pembangunan di desa Sonsilo mengakibatkan pertumbuhan pembangunan dalam desa tidak terasa. Kekecewaan masyarakat terhadap mekanisme kegiatan yang tanpa transparan terhadap desa sedangkan masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan musrembang yang dilakukan disetiap tahunnya.

Cohen dan Uphoff (dalam Soetomo (2008:12). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan. Dari teori ini peneliti membandingkan dengan fenomena lapangan terhadap penelitian ini, alhasilnya teori ini sangat cocok untuk dikembangkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menemukan bahwa partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan

masyarakat. Jadi, tidak ada partisipasi masyarakat dari hasil musrembang yang berlangsung dalam desa. Partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan musrembang dan mencetuskan program-program yang berkualitas serta membantu pemerintah desa lebih bersemangat membangun desa bersama-sama warga masyarakat.

Cohen dan Uphoff (dalam Soetomo 2008:12), Partisipasi dalam evaluasi adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan secara langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi serta menilai kerja pemerintah desa begitu terasa dalam lapangan penelitian sebab program yang baru disetujui bahkan yang telah berlangsung semuanya diawasi oleh warga masyarakat. Evaluasi kerja pemerintah desa untuk semua hasil yang telah dan belum dilakukan akan dibahas dalam sebuah musyawarah yang dilakukan bersama-sama masyarakat dan unsur desa lainnya. Hasil musyawarah menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan RKP-Desa dan daftar usulan RKP-Desa. RKP-Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP-Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat bulan September tahun berjalan RKP-Desa menjadi dasar penetapan APB-Desa. Dokumen rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) dan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan dokumen informasi publik. Sebagai dokumen publik, pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat desa. Keterbukaan informasi di desa terdapat didalam beberapa pasal UU Desa,

seperti dalam pasal 24, pasal 26, pasal 27, dan pasal 68. Tatacara kepala desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 46 tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.

Dengan adanya musrembang yang dilaksanakan di desa diharapkan menjadi suatu tolak ukur menjadikan desa itu bertumbuh ataupun sebaliknya. Respon positif dari masyarakat dan pemerintah desa menentukan perkembangan desa itu tetapi jika respon pemerintah dan masyarakat bertentangan maka hasil dari musrembang itu sendiri pasti hasilnya negatif sehingga partisipasi masyarakat juga menurun drastis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Sonsilo tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama. Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja. Masyarakat di desa Sonsilo merasa pemerintah desa tidak peduli dengan program-program yang telah diusulkan untuk pembangunan di desa dan hanya membahas kepentingan pemerintah semata. Oleh karena itu masyarakat merasa percuma hadir dalam acara musrembang jika hasilnya pasti tetap serupa. Masyarakat dan pemerintah di Desa Sonsilo seharusnya dengan diadakan musrembang ini meningkatkan kemajuan dan pembangunan bersama untuk masa depan desa Sonsilo, akan tetapi dilapangan peneliti menemukan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam musrembang dengan dasar kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang tidak peduli dengan usulan program

masyarakat yang disepakati bersama. Musrembang yang selalu diadakan di desa Sonsilo bagi masyarakat setempat hanya membuang-buang waktu serta anggaran jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat desa. Masyarakat desa Sonsilo juga menganggap dan berharap kedepannya dengan diadakan musrembang janganlah mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan dalam desa maupun pribadi melainkan untuk kepentingan bersama-sama untuk kemajuan dan perkembangan desa Sonsilo.

Peneliti menemukan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa Sonsilo semuanya berjalan sesuai rencana kerja namun setiap kegiatan tersebut hanya dibuat untuk memenuhi kegiatan yang telah disepakati dalam program ker-ja namun hasil dari setiap program berjalan tidak dirasakan oleh masyarakat setempat. Sebab program dari hasil musrembang tersebut bukan dari rakyat dan untuk rakyat melainkan dari pemangku kepentingan politik semata. Musrembang dilaksanakan dalam setiap desa ialah bertujuan mensejahterakan masyarakat lewat program-program unggulan yang dibuat dan disepakati bersama. Oleh karena itu, setiap musrembang wajib masyarakat dilibatkan sehingga terjadi saling percaya dan keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat akan meningkat jika pemerintah desa memberikan ruang dan kepercayaan serta transparansi kepada masyarakat di desa Sonsilo yang adalah masyarakat setempat dimana kerja sama akan terjalin sebagai patner membangun desa bersama-sama untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat tergantung kepada pemerintah desa Sonsilo, jika

pemerintah tidak membuka ruang untuk masyarakat maka tidak menutup kemungkinan partisipasi masyarakat juga pasti menurun. Peneliti menemukan bahwa ruang diskusi antara masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, BPD dan Pemerintah desa tidak terjalin baik, sehingga setiap musrembang yang diadakan pasti ada kepentingan-kepentingan kelompok dalam desa yang mengutamakan program kepentingan bukannya program unggulan. Akibatnya program-program tersebut bukan dari rakyat untuk rakyat tetapi dari kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik semata. Alhasilnya masyarakat dijadikan tikus perco-baan dengan aturan-aturan yang bukan dari rakyat.

Dari hasil ini peneliti juga menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di desa Sonsilo ialah pemerintah desa memilih program-program sendiri dan bukan dari masyarakat untuk masyarakat. Pemerintah desa juga tidak melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan musrembang dan pemerintah desa hanya berharap kerja swadaya dari masyarakat. Masyarakat merasa bahwa pemerintah desa Sonsilo membutuhkan bantuan mereka jika itu menyangkut kerja dan bantuan swadaya, tetapi jika keperluan masyarakat pemerintah desa Sonsilo tidak begitu memperdulikan. Sehingga terjadi kekurangan partisipasi masyarakat dalam setiap musrembang yang diadakan dalam desa Sonsilo.

Kesimpulan

Terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan di desa atau yang biasa disebut dengan musrembang desa sebab masyarakat

merasa pemerintah desa tidak membuka ruang diskusi yang benar untuk membahas semua kegiatan yang harus dilakukan untuk pembangunan di desa Sonsilo. Kurangnya partisipasi masyarakat karena pemerintah desa tidak melibatkan warga masyarakat untuk duduk bersama dan bermufakat membangun desa bersama-sama karena masyarakat hanya menjadi penonton dalam kampung sendiri.

Saran

Pemerintah desa perlu membuka ruang diskusi bagi warga masyarakat dalam setiap kegiatan musrembang maupun kegiatan lainnya yang diadakan dalam desa Sonsilo, serta pemerintah desa perlu melibatkan warga masyarakat untuk ikutserta dalam musrembang untuk duduk bersama dan bermufakat membangun desa Sonsilo bersama-sama agar masyarakat bisa mandiri serta membangun desa tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah desa untuk membangun desa Sonsilo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayani, S. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo.
- Isbandi, R. A. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok FISIP UI Press.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-187/Kep/Bangda/2007 **TENTANG** Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan.

- Moleong, L. J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhi, A. H. 2017 Fenomena Pembangunan De-sa, <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.
- Pemendagri Nomor Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Menteri Da-lam Negeri.
- Rahardjo.2010. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Sartika. M. 2008. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata. Skripsi. Medan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara.
- Sunggono, B. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung; Alfabeta.
- Soetomo. 2012. Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerang-ka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi. I. N. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Dae-rah. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.